

Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan riil daerah dalam membiayai belanja pembangunan, khususnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur fisik dasar dan konektivitas antarwilayah, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu pada Tahun 2022 melakukan kebijakan **pinjaman daerah** sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan.

Pinjaman daerah tersebut bersumber dari **BPD Maluku–Maluku Utara** sebagai bagian dari upaya **pemulihan ekonomi daerah**, dengan fokus pada kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam **RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2021–2026**, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan. Pelaksanaan pinjaman daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah melalui proses pengujian dan pendalaman terhadap kemampuan fiskal serta APBD Pemerintah Daerah.

Jangka waktu pengembalian pinjaman ditetapkan maksimal sesuai dengan masa jabatan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu sampai dengan tahun 2024, dengan ketentuan biaya provisi sebesar **1%** serta tingkat bunga sebesar **10% per tahun (menurun)**.

Adapun besaran pinjaman daerah yang direalisasikan pada Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebesar **Rp115.000.000.000,-**. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Daerah telah melakukan pembayaran pengembalian pokok pinjaman beserta bunga secara bertahap sesuai dengan jadwal kewajiban yang telah ditetapkan.

Selanjutnya analisis terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2025-2026 kemudian dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6

Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu 2027

Rek	Uraian Pembiayaan	APBD 2026	Target 2027	Bertambah/ (Berkurang)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.855.000.000	14.855.000.000	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	14.855.000.000	14.855.000.000	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-



RKPD 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PULAU TALIBU

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD 2027

KABUPATEN PULAU TALIBU



TALIABU MAJU,
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas pembangunan daerah berisi sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Program-program tersebut disusun sebagai instrumen utama untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan terukur.

Program prioritas pembangunan daerah diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Penyusunan program prioritas juga memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara, serta kebutuhan dan karakteristik pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027, program prioritas pembangunan daerah difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan sebagai sektor unggulan daerah, peningkatan daya saing ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024–2029. Oleh karena itu, arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2027 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tahun 2027 menjadi periode yang strategis dalam pelaksanaan RPJMD karena merupakan tahapan percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada awal periode perencanaan. Pada tahap ini, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian kinerja pembangunan, berbagai permasalahan yang masih dihadapi, serta peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi pada tahun perencanaan berikutnya.

Hasil evaluasi RKPD Tahun 2026 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator pembangunan yang perlu ditingkatkan, terutama terkait kualitas infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, pembangunan yang telah dilaksanakan juga menunjukkan berbagai capaian positif yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024–2029.

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024–2029. Penyusunan RKPD dilakukan sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin keterpaduan, keselarasan, dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

RKPD Tahun 2027 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2027. Oleh karena itu, RKPD memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, program, kegiatan, serta target kinerja yang akan dicapai selama satu tahun perencanaan.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026, capaian indikator pembangunan daerah, kondisi perekonomian daerah, kemampuan keuangan daerah, serta berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan yang berkembang di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Selain itu, RKPD juga disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi publik lainnya.

Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024–2029, RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah melalui penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dan permasalahan pembangunan daerah, tetapi juga memperhatikan keselarasan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029. Keselarasan tersebut penting untuk mewujudkan sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Melalui harmonisasi kebijakan tersebut, program dan kegiatan pembangunan daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu. Prioritas pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, penguatan ketahanan sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang merata, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027, Pemerintah Daerah berpedoman pada sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. RKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan, sasaran, serta program prioritas nasional yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan.

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan RKP Tahun 2027 dilakukan untuk memastikan adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Dengan demikian, program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan serta permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah.

Dalam proses penyusunannya, prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 juga mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, capaian indikator pembangunan daerah, isu-isu strategis yang berkembang, potensi dan karakteristik daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, prioritas pembangunan yang ditetapkan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah.

Melalui sinergi antara prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman dalam merumuskan prioritas, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun perencanaan. Arah kebijakan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selaras dengan agenda pembangunan nasional, sehingga tercipta sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027, arah kebijakan pembangunan nasional digunakan sebagai dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan nasional memberikan kerangka dalam menentukan fokus pembangunan daerah, terutama pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari **Asta Cita**, yaitu delapan misi pembangunan yang menjadi arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045**. Asta Cita tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam berbagai program prioritas nasional lintas kementerian dan lembaga.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, prioritas nasional menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan prioritas, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan agar selaras dengan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan Asta Cita, khususnya dalam hal penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Asta Cita merupakan delapan misi pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional menuju **Indonesia Emas 2045**. Asta Cita tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam **8 prioritas nasional Presiden Prabowo**

yang menjadi fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun **Prioritas Nasional Presiden Republik Indonesia** terdiri dari delapan agenda utama sebagai berikut :

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui penguatan koperasi.
4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”**, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Tema tersebut menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional yang menekankan peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan investasi, serta percepatan industrialisasi berbasis nilai tambah. Selain itu, tema ini juga diarahkan untuk memperkuat pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, untuk melaksanakan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”**, pemerintah pusat mendukungnya melalui **Program Nasional Spesifik** yang menjadi instrumen operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional secara lebih terarah dan terukur.

Program Nasional Spesifik tersebut mencakup berbagai program prioritas lintas sektor yang dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

1. Program penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta penguatan rantai pasok pangan nasional;
2. Program ketahanan energi dan transisi energi menuju energi baru terbarukan;
3. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan penguatan kompetensi tenaga kerja;
4. Program penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;

5. Program pengembangan industri dan hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Program penguatan ekonomi desa, UMKM, dan kewirausahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif;
7. Program penguatan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan;
8. Program reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
9. Program penguatan ketahanan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan **swasembada pangan, energi, dan air** sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional. Komitmen ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber eksternal.

Dalam bidang pangan, swasembada diwujudkan melalui peningkatan produksi pertanian, penguatan sistem irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta penguatan rantai pasok dan distribusi pangan. Pada sektor energi, kebijakan diarahkan pada pengembangan energi baru terbarukan, optimalisasi sumber daya energi dalam negeri, serta peningkatan efisiensi dan kemandirian energi nasional. Sementara itu, dalam sektor air, pemerintah berfokus pada pengelolaan sumber daya air secara terpadu melalui pembangunan infrastruktur air, konservasi daerah aliran sungai, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Pengelolaan sampah nasional saat ini menghadapi kondisi yang semakin menantang, bahkan mengarah pada kondisi darurat, seiring dengan meningkatnya proyeksi timbulan sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), **timbulan sampah nasional Indonesia saat ini mencapai sekitar ± 70 juta ton per tahun**, dan diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta rendahnya kesadaran dalam pengelolaan sampah menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya volume sampah di berbagai wilayah. Apabila tidak dikelola secara optimal, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, peningkatan risiko kesehatan masyarakat, serta penurunan kualitas lingkungan hidup.

Di sektor pendidikan, pemerintah berupaya untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, geografis, maupun kondisi fisik. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Perluasan akses pendidikan inklusif dilakukan melalui berbagai kebijakan, antara lain peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan distribusi tenaga pendidik, penguatan layanan pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan, serta pemberian dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui program bantuan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sejalan dengan upaya tersebut, **Program Sekolah Rakyat** merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih merata melalui pendekatan pendidikan yang lebih adaptif, berbasis komunitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat rentan. Melalui Program Sekolah Rakyat, diharapkan tidak ada anak usia sekolah yang terputus dari layanan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi maupun akses geografis.

Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh percepatan hilirisasi yang difokuskan pada beberapa komoditas unggulan, yang meliputi komoditas strategis di sektor sumber daya alam dan sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Kebijakan hilirisasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memperkuat struktur industri nasional, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan nasional.

Komoditas unggulan yang menjadi fokus hilirisasi umumnya mencakup sektor **pertambangan dan mineral**, seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah, yang diolah menjadi produk antara maupun produk akhir industri. Selain itu, sektor **perkebunan** seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan kelapa juga menjadi prioritas hilirisasi untuk menghasilkan produk olahan bernilai tinggi. Pada sektor **perikanan dan kelautan**, hilirisasi diarahkan pada pengolahan hasil laut menjadi produk makanan olahan, farmasi, dan industri turunan lainnya.

Selanjutnya, sektor **pertanian dan pangan** juga menjadi bagian penting dari hilirisasi melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada produk mentah. Tidak hanya itu, hilirisasi juga mulai diperluas pada sektor **ekonomi kreatif dan industri berbasis digital** yang memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

Dalam rangka mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat berbagai kebijakan dan program strategis yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan, serta penguatan akses terhadap layanan dasar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja.

Di samping itu, percepatan pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan konektivitas wilayah, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan. Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, serta sanitasi juga menjadi bagian penting dalam strategi pengurangan kemiskinan.

Dalam konteks penguatan ekonomi kerakyatan, pemerintah juga mengembangkan **program Koperasi Merah Putih** sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang inklusif, meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, memperkuat rantai produksi dan distribusi lokal, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan komunitas. Melalui Koperasi Merah Putih, diharapkan terjadi penguatan ekonomi berbasis gotong royong yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut tabel Sasaran Makro Pembangunan Nasional sesuai RKP Tahun 2027 yang dapat digunakan dalam dokumen RKPD :

No	Indikator Makro	Sasaran/Target 2027	Arah Kebijakan
1	Pertumbuhan Ekonomi	$\pm 5,8 - 6,3\%$	Peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\pm 4,5 - 5,0\%$	Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan sektor padat karya
3	Tingkat Kemiskinan	$\pm 6,5 - 7,0\%$	Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat
4	Gini Ratio	$\pm 0,36 - 0,37$	Pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$\pm 75,5 - 76,0$	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan
6	Inflasi	$\pm 2,5 \pm 1\%$	Stabilitas harga dan penguatan ketahanan pangan
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	≥ 105	Penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan petani
8	Rasio Investasi terhadap PDB	$\pm 34 - 36\%$	Perbaikan iklim investasi dan hilirisasi industry
9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	$\pm 31,89\%$ (NDC)	Transisi energi bersih, ekonomi hijau, dan pengendalian deforestasi
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$\pm 75 - 77$ (kategori baik)	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program prioritas daerah yang akan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan. Program prioritas tersebut merupakan penjabaran operasional dari arah kebijakan pembangunan provinsi yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, permasalahan, serta kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.

Melalui proses tersebut, setiap pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, diharapkan dapat menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan provinsi agar tercipta keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antarlevel pemerintahan. Program prioritas daerah yang disusun tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan.

Selanjutnya, penyusunan **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026** berpedoman pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026**.

Permendagri tersebut mengatur bahwa RKPD Tahun 2026 disusun oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada visi, misi, serta program kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD, serta harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

Selain itu, Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa RKPD Tahun 2026 memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan tahunan, program strategis nasional, serta hasil kesepakatan Rakortekbang Nasional.

Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Sasaran/Target 2027	Arah Kebijakan
1	Pertumbuhan Ekonomi	$\pm 11\text{--}12\%$	Hilirisasi, investasi, dan penguatan sektor unggulan
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\pm 4,0\text{--}4,5\%$	Penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri padat karya
3	Tingkat Kemiskinan	$\pm 9\text{--}10\%$	Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat
4	Gini Ratio	$\pm 0,33\text{--}0,35$	Pemerataan pembangunan antarwilayah
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkat ($\pm 72\text{--}73$)	Peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan
6	Inflasi	$\pm 2,5 \pm 1\%$	Stabilitas harga dan penguatan ketahanan pangan
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	≥ 105	Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan Perkebunan
8	Rasio Investasi terhadap PDRB	$\pm 34\text{--}36\%$	Perbaikan iklim investasi dan percepatan hilirisasi
9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	$\pm 31,89\%$ (NDC)	Ekonomi hijau, energi bersih, dan konservasi lingkungan
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$\pm 75\text{--}77$	Pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan

RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi bagian dari tahapan awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan, konsistensi, dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang.

Pada tahun ketiga RPJMD ini, pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada penguatan transformasi ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari RPJPD 2025–2045, RKPD Tahun 2027 juga menjadi tahap konsolidasi awal dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Maluku Utara, yaitu pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, RKPD Tahun 2027 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah menuju transformasi jangka panjang.

Dalam rangka menjamin keselarasan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2045 menetapkan visi pembangunan yaitu:

“Maluku Utara Mariomoi sebagai Hub Kemaritiman Timur Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut dijabarkan ke dalam **lima (5) sasaran utama pembangunan jangka panjang**, yang menjadi indikator arah transformasi pembangunan daerah, yaitu:

1. Terwujudnya SDM yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing

Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja serta penguatan karakter masyarakat Maluku Utara.

2. Terwujudnya Ekonomi Maritim dan Sumber Daya Alam yang Maju dan Bernilai Tambah Tinggi

Mengarah pada penguatan sektor kemaritiman, perikanan, pertambangan, pertanian, serta percepatan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

3. Terwujudnya Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah Kepulauan yang Merata dan Andal
Menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih, dan telekomunikasi untuk mendukung integrasi antarwilayah kepulauan di Maluku Utara.

4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Inovatif

Mencakup reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi.

5. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari dan Ketahanan Sosial Budaya yang Kuat

Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian perubahan iklim, serta penguatan nilai budaya, sosial, dan kearifan lokal masyarakat kepulauan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 disusun dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu:

“Menjaga Keberagaman, Memperkuat Kebersamaan, dan Mewujudkan Maluku Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut menjadi landasan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman masyarakat Maluku Utara, sekaligus mendorong transformasi pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 pada periode lima tahun pertama, yang berfokus pada tahap **penyiapan fondasi transformasi tata kelola pembangunan daerah**. Tahap ini diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi dalam berbagai sektor pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan, sebagai dasar menuju pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang berkelanjutan.

Pada tahap awal ini, pembangunan daerah difokuskan pada penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan struktur ekonomi daerah yang berdaya saing. Selain itu, penekanan juga diberikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan konektivitas wilayah kepulauan guna mendukung integrasi ekonomi daerah.

Adapun tema RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 adalah: “Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Penyiapan Fondasi Transformasi.”

Tema tersebut mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada penguatan sektor ekonomi unggulan berbasis hilirisasi dan potensi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, produktif, dan kompetitif. Melalui penguatan kedua aspek tersebut, diharapkan Provinsi Maluku Utara mampu membangun fondasi transformasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029, yang diarahkan pada tahap **penyiapan fondasi transformasi pembangunan daerah**. Fokus pembangunan diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, tata kelola pemerintahan, stabilitas daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berkeadilan.

1. Tujuan 1: Terwujudnya SDM berkualitas, unggul, dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Sasaran 1: Terwujudnya kesehatan untuk semua
 - b. Sasaran 2: Terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata
 - c. Sasaran 3: Terwujudnya perlindungan sosial adaptif
 - d. Sasaran 4: Terwujudnya masyarakat inklusif dan peran pemuda dalam pembangunan
2. Terwujudnya kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis teknologi, dengan sasaran:
 - a. Sasaran 5: Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan
 - b. Sasaran 6: Meningkatnya ekonomi kreatif dan pariwisata
 - c. Sasaran 7: Terwujudnya daya saing industri dan perdagangan
 - d. Sasaran 8: Terwujudnya kemandirian pangan
3. Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif, dengan sasaran:
 - a. Sasaran 9: Terwujudnya pelayanan publik berbasis digital
 - b. Sasaran 10: Terwujudnya akuntabilitas pemerintahan
4. Tujuan 4: Terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi, dengan sasaran:
 - a. Sasaran 11: Meningkatnya kondusivitas daerah
 - b. Sasaran 12: Meningkatnya daya saing investasi
5. Tujuan 5: Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal, dengan sasaran:
 - a. Sasaran 13: Meningkatnya pelestarian dan penerapan nilai-nilai kearifan local
 - b. Sasaran 14: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6. Tujuan 6: Terwujudnya pengembangan wilayah terintegrasi dengan infrastruktur berkualitas dan berkeadilan, dengan sasaran:
 - a. Sasaran 15: Terwujudnya desa sebagai simpul pertumbuhan local
 - b. Sasaran 16: Meningkatnya konektivitas antar wilayah
 - c. Sasaran 17: Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata

Sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025–2029 pada tahap awal pelaksanaan, yang diarahkan pada penguatan fondasi transformasi pembangunan daerah. Sasaran tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya saing.

Adapun sasaran pembangunan RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 meliputi:

No	Indikator	Target 2027
1	Indeks Modal Manusia	Meningkat ($\pm 0,56-0,58$)
2	Tingkat Kemiskinan	$\pm 9,0 - 10,0$ persen
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	$\pm 70 - 71$ tahun
4	Prevalensi Stunting (pendek & sangat pendek)	≤ 18 persen
5	Harapan Lama Sekolah	$\pm 13,5 - 13,8$ tahun
6	Rata-rata Lama Sekolah usia di atas 15 tahun	$\pm 9,5 - 10,0$ tahun
7	Indeks Kesejahteraan Sosial	$\pm 70 - 72$ poin
8	Indeks Pembangunan Berwawasan Kebudayaan	$\pm 65 - 67$ poin
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\pm 11,0 - 12,0$ persen
10	Pendapatan per Kapita	$\pm \text{Rp } 105 - 120$ juta/kapita
11	Proporsi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	$\pm 11 - 13$ persen
12	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	$\pm 0,25 - 0,30$ persen
13	Rasio PDRB Industri dan Perdagangan\	$\pm 18 - 20$ persen
14	Indeks Ketahanan Pangan	$\pm 85 - 88$ poin
15	Indeks Reformasi Birokrasi	59,95 poin
16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,09 poin
17	Indeks Pelayanan Publik	3,20 poin
18	Nilai AKIP	64,24 poin
19	Indeks Integritas Nasional	60,96 poin
20	Indeks Demokrasi Indonesia	68,32 poin
21	Indeks Trantibumlinmas	68,00 poin
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	47,00 persen
23	Indeks Harmoni Indonesia	66,00 poin

24	Penurunan Intensitas Emisi GRK	88,25 persen
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,06 poin
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,53 poin
27	Indeks Risiko Bencana	139,00 poin
28	Indeks Desa	0,6553 poin
29	Rasio Konektivitas	96,25 persen
30	Pilar Infrastruktur IDSD	2,75 poin

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menjadi pedoman arah pembangunan jangka panjang, sekaligus memberikan arah transformasi pembangunan daerah secara berkelanjutan, terarah, dan terintegrasi.

Visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Pulau Taliabu yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Berbasis Kepulauan.”

Visi tersebut mencerminkan cita-cita pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulau Taliabu diarahkan pada penguatan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, serta pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045 menjadi dasar utama dalam penyusunan RPJMD dan RKPD pada setiap periode, guna memastikan kesinambungan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang sebagai arah kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, yaitu:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan sejahtera**, melalui peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, serta kesejahteraan sosial masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
2. **Mewujudkan daya saing dan pemerataan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah**, dengan mengoptimalkan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya daerah.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inovatif**, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. **Mewujudkan masyarakat yang aman, tangguh, dan demokratis**, dengan memperkuat stabilitas sosial, keamanan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
5. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan**, melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, penyediaan infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kepulauan.
6. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045, telah ditetapkan tujuan dan sasaran pokok pembangunan sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Pulau Taliabu yang **maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan**. Pembangunan jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun ke depan difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok yang dikelompokkan dalam enam arah kebijakan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan 1: Perwujudan manusia yang unggul, sehat, dan Sejahtera
Sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
 - b. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata
 - c. Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif
2. Arah Kebijakan 2: Peningkatan kemandirian dan ekonomi wilayah yang kompetitif, inovatif, dan adil dalam rangka pemerataan pembangunan antarwilayah
Sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis IPTEK dan inovasi
3. Arah Kebijakan 3: Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas, kolaboratif, adaptif, dan inovatif
Sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya transformasi tata kelola dan inovasi layanan publik yang akuntabel
4. Arah Kebijakan 4: Perwujudan daerah yang aman, damai, dan toleran yang maju dan Sejahtera
Sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:
 - a. Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman
5. Arah Kebijakan 5: Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan wilayah sesuai karakteristik dan potensi unggulan sumber daya alam secara merata dan berkeadilan
Sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya kemudahan konektivitas antarwilayah
 - b. Meningkatnya akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan
6. Arah Kebijakan 6: Perwujudan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dalam menghadapi perubahan
Sasaran pokok yang ingin dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup
 - b. Meningkatnya sistem dan teknologi untuk ketercukupan pangan
 - c. Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045, pembangunan daerah dilaksanakan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada periode saat ini, Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan **RPJMD ke-3 Tahun 2025–2029**

sebagai bagian penting dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan jangka panjang daerah.

RPJMD ke-3 ini menjadi tahapan strategis dalam memperkuat fondasi transformasi pembangunan daerah, yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kemandirian ekonomi, pemerataan infrastruktur wilayah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Selain itu, RPJMD ini juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh capaian pembangunan jangka menengah tetap selaras dengan arah kebijakan RPJPD 2025–2045.

Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, Adaptif) yang maju di Provinsi Maluku Utara.”

Visi tersebut mencerminkan arah pembangunan daerah yang menekankan pada kemandirian daerah dalam mengelola potensi sumber daya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, terciptanya kondisi daerah yang damai dan harmonis, serta kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam beradaptasi terhadap dinamika perubahan pembangunan.

Melalui visi ini, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu mempercepat pembangunan di berbagai sektor secara inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang maju di Provinsi Maluku Utara.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, Adaptif) yang maju di Provinsi Maluku Utara”*, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Membangun dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang amanah, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam pelayanan publik.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis kepulauan yang terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta kelancaran distribusi barang dan jasa.
5. Mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari serta memperkuat ekonomi rakyat yang berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6. Mewujudkan masyarakat Pulau Taliabu yang berakhlak mulia, berbudaya, dan toleran.
7. Meningkatkan potensi serta pengembangan sektor maritim yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 :

1. Tujuan 1: Membangun sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat
Sasaran:
 - a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Pulau Taliabu
2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing
Sasaran:
 - a. Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata

3. Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik
Sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Tujuan 4: Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan
Sasaran:
 - a. Meningkatnya kemudahan konektivitas antarwilayah
 - b. Meningkatnya akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan
5. Tujuan 5: Membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi
Sasaran:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah
 - b. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif secara inklusif
6. Tujuan 6: Memperkuat peran UMKM dan badan usaha lainnya
Sasaran:
 - a. Meningkatnya kewirausahaan, daya saing, dan kemandirian UMKM, koperasi, BUMD, dan badan usaha lainnya
7. Tujuan 7: Terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing
Sasaran:
 - a. Meningkatnya ekonomi masyarakat secara inklusif
 - b. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan
8. Tujuan 8: Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup
Sasaran:
 - a. Terwujudnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana
9. Tujuan 9: Terwujudnya sektor maritim yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan
Sasaran:
 1. Meningkatnya produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan pelaku usaha sektor perikanan

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027 disusun berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025, sasaran makro RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2027, serta arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
1.	Membangun sumber daya manusia Kabupaten Pulau		Usia Harapan Hidup
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Pulau Taliabu	Angka Kematian Ibu

2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, dan Berdaya saing	Indeks Modal Manusia
	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata	1. Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional - Literasi Membaca 2. Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional – Numerasi 3. Angka Harapan Lama Sekolah
3.	Terwujudnya tata kelola	Indeks Reformasi Birokrasi
	1. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
	2. Meningkatkan Kualitas	Indeks Pelayanan Publik
4.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur
	1. Meningkatkan kemudahan konektivitas antar Wilayah	1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik 2. Cakupan layanan
	2. Meningkatkan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	1. Rumah Tangga Layak Huni 2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum 3. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman
5	Membangun dan meningkatkan kesejahteraan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	1. Rasion PDRB Industri Pengolahan 2. Pengembangan Pariwisata – Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 3. Pengembangan Pariwisata - Rasio
	Meningkatkan SDM yang kompeten dan	1. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal

		produktif secara inklusif	2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
6	Memperkuat peran UMKM dan badan usaha lainnya		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota
		Meningkatkan kewirausahaan, daya saing dan kemandirian UMKM, Koperasi, BUMD dan Badan Usaha Lainnya	1. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN – Rasio Kewirausahaan Daerah 2. Rasio Volumen Usaha Koperasi
7	Terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing		Pertumbuhan ekonomi
		Meningkatkan ekonomi Masyarakat secara inklusif	1. Rasio Gini 2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan	Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan 2027

Keterpaduan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sinergi perencanaan pembangunan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Maluku Utara.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Maluku Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2027, Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027, serta arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045 dan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029.

Tema pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diarahkan pada penguatan fondasi transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan.

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2027, Pemerintah menetapkan **8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)** yang menjadi fokus pembangunan

lintas sektor. Klaster ini merupakan penjabaran operasional dari Prioritas Nasional, Program Prioritas Presiden, dan Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, serta mewujudkan transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

No	Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027	Program Prioritas
1	Kedaulatan Pangan	a. 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih b. 4.582 Kapal Ikan Modern c. 40.000 Lokasi Budidaya Ikan Darat Tematik d. Revitalisasi Tambak Nila Salin 14.090 Ha di Pantura e. Modeling dan Replikasi 2.000 Ha Tambak Udang Terintegrasi f. 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional g. Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi h. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu Mete, Rempah) i. Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur
2	Kemandirian Energi dan Air	a. Mandatori Biodiesel 50 (B50) b. Mandatori Bioetanol 20 (E20) c. Program PLTS 100 GW d. Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) e. Konversi 6 Juta Motor BBM ke Motor Listrik f. Pembangunan Jargas 1 Juta Sambungan Rumah g. Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi h. 10 Small Scale Green Modular Refinery dan 6 Storage i. Eksplorasi 10 Blok Migas Baru j. Elektrifikasi 10.000 Desa k. Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) l. PLTA Skala Besar Terintegrasi m. Kompor Listrik untuk 2–5 Juta Rumah Tangga n. Optimalisasi 45.000 Sumur Minyak Masyarakat o. Optimalisasi Lifting di 13.824 Sumur Tua p. Program Swasembada Air
3	Pendidikan	a. Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah b. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah c. Bantuan Perlengkapan Sekolah d. 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) e. Studio Guru f. Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital) g. 20 Sekolah Garuda Baru h. 80 Sekolah Garuda Transformasi i. 514 Sekolah Rakyat j. 10 Universitas Baru berbasis STEMM k. 500.000 Lulusan SMK Go Global l. Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional m. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Transfer Langsung Tunjangan n. Pelindungan Anak di Ruang Digital melalui PP TUNAS
4	Kesehatan	a. Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

		b. Upgrade 66 Rumah Sakit c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis d. Penuntasan Tuberkulosis (TBC)
5	Hilirisasi dan Industrialisasi	a. Hilirisasi Industri Strategis (18 Proyek) b. Mobil Nasional c. Motor Nasional d. Ekosistem Industri Kedirgantaraan e. Pengembangan Industri Semikonduktor
6	Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana	a. Giant Sea Wall b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera c. Gerakan ASRI (Gentengisasi, Pengendalian Sampah, Penghijauan) d. Program 3 Juta Rumah (1 Juta Rumah Baru dan 2 Juta Renovasi Rumah) e. Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional
7	Ekonomi Kerakyatan dan Desa	a. 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih b. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)
8	Penurunan Kemiskinan	a. PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi b. PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja

Kedelapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027 menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah. Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, klaster yang memiliki keterkaitan langsung antara lain **Kedaulatan Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Desa, Penurunan Kemiskinan**, serta **Infrastruktur dan Perumahan**, mengingat karakteristik daerah sebagai wilayah kepulauan yang masih menghadapi tantangan pada aspek konektivitas, ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinkronisasi antara Prioritas Nasional, RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2027, dan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027, diharapkan tercipta keterpaduan pembangunan yang mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 ditujukan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, investasi, industrialisasi, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. PSN menjadi instrumen strategis pemerintah dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, penguatan daya saing, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tema RKP Tahun 2027 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”**

Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, kebijakan PSN Tahun 2027 difokuskan pada pembangunan yang mampu memberikan dampak ekonomi tinggi (*high impact*), memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air. Pelaksanaan PSN juga diarahkan untuk memperkuat hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan wilayah kepulauan, kawasan perdesaan, dan daerah afirmasi.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, pemerintah merencanakan total **314 Proyek Strategis Nasional (PSN)** yang mencakup berbagai proyek baru, lanjutan, hingga prioritas direktif Presiden. Proyek tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan berfokus pada 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan sumber penetapan dan tingkat prioritas pelaksanaannya. PSN merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui proyek-proyek yang berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, PSN dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

1. **PSN Direktif Presiden**, yaitu proyek-proyek strategis yang secara langsung diarahkan oleh Presiden sebagai bagian dari agenda prioritas nasional. PSN jenis ini memiliki tingkat urgensi tinggi dan menjadi fokus utama dalam percepatan pembangunan nasional karena dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kewilayahan.
2. **PSN Usulan Baru**, yaitu proyek strategis yang diusulkan untuk menjadi bagian dari PSN berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pembangunan nasional, usulan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. PSN ini diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis baru dan kebutuhan pembangunan yang berkembang sesuai dinamika nasional.
3. **PSN Lanjutan**, yaitu proyek strategis yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya dan masih dalam tahap pelaksanaan atau penyelesaian. PSN lanjutan tetap menjadi prioritas karena memiliki dampak langsung terhadap penyelesaian pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta optimalisasi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Berikut adalah **Daftar PSN Direktif Presiden dalam RKP Tahun 2027** yang menjadi bagian dari proyek strategis prioritas nasional dan diarahkan langsung oleh Presiden:

No	PSN Direktif Presiden	Fokus Program
1	PSN Makan Bergizi Gratis	Peningkatan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan penguatan kualitas SDM
2	PSN Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa/kelurahan
3	PSN Sekolah Rakyat	Pemerataan akses pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu
4	PSN Kartu Usaha Afirmatif	Dukungan permodalan dan penguatan usaha masyarakat rentan
5	PSN Kartu Kesejahteraan	Penguatan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
6	PSN Digitalisasi Pendidikan	Transformasi pendidikan berbasis teknologi dan digital
7	PSN Pengelolaan Sampah Terpadu	Penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berbasis ekonomi sirkular

8	PSN Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit	Peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan nilai tambah sawit nasional
9	PSN Pengembangan Mobil Nasional	Penguatan industri otomotif nasional berbasis kemandirian teknologi

Prioritas Utama Pembangunan Nasional Tahun 2027

Prioritas Utama Pembangunan Nasional Tahun 2027 difokuskan pada tema besar **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”** dengan target pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran **5,9–7,5 persen**. Arah kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2025–2029.

Dalam RKP Tahun 2027, terdapat sekitar **60 Program Prioritas Nasional** yang dikelompokkan dalam tiga tema besar serta diperkuat dengan program-program direktif Presiden. Keseluruhan program tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Secara umum, fokus utama prioritas pembangunan nasional Tahun 2027 meliputi:

a. Pengembangan Sektor Industri dan Investasi

Fokus ini diarahkan pada peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam serta penguatan sektor industri masa depan. Berikut penjabaran Pengembangan Sektor Industri dan Investasi :

No	Aspek Fokus	Uraian Detail	Arah Kebijakan / Strategi	Output yang Diharapkan
1	Hilirisasi Sumber Daya Alam	Penguatan pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi	Pengembangan industri pengolahan mineral, perkebunan, kelautan, dan kehutanan	Peningkatan ekspor produk olahan dan nilai tambah domestik
2	Industrialisasi Strategis	Pengembangan industri masa depan berbasis teknologi	Pengembangan industri semikonduktor, kedirgantaraan, otomotif nasional (mobil dan motor nasional)	Terbangunnya industri berteknologi tinggi dan berdaya saing global
3	Penguatan Kawasan Industri	Pembangunan dan pengembangan kawasan industri dan KEK	Penguatan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terintegrasi, dan sentra produksi	Terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah
4	Peningkatan Investasi	Peningkatan arus investasi domestik dan asing	Penyederhanaan perizinan (OSS), insentif fiskal, kepastian hukum investasi	Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN

5	Kemudahan Berusaha	Reformasi regulasi dan birokrasi investasi	Digitalisasi perizinan, reformasi regulasi usaha, penguatan pelayanan investasi	Meningkatnya indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business)
6	Penguatan Infrastruktur Industri	Penyediaan infrastruktur pendukung sektor industri	Pembangunan pelabuhan, jalan logistik, energi, air industri, dan konektivitas	Efisiensi biaya produksi dan distribusi industri
7	Transformasi SDM Industri	Peningkatan kualitas tenaga kerja industri	Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, link and match industri dan pendidikan	Tersedianya tenaga kerja kompeten dan siap industri
8	Inovasi dan Teknologi Industri	Penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi industri	Pengembangan pusat riset, teknologi industri, dan transformasi digital	Peningkatan daya saing industri berbasis inovasi
9	Penguatan UMKM Berbasis Industri	Integrasi UMKM dalam rantai pasok industri	Pengembangan UMKM naik kelas, kemitraan industri besar, dan digitalisasi UMKM	UMKM terintegrasi dalam ekosistem industri nasional
10	Pemerataan Wilayah Industri	Pengembangan industri di luar Jawa	Pembangunan industri berbasis potensi daerah (kepulauan, perbatasan, dan 3T)	Pengurangan ketimpangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah

b. Swasembada dan Ketahanan Nasional

Fokus ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian bangsa dalam bidang pangan, energi, dan air guna mendukung stabilitas ekonomi nasional. Berikut penjabaran Pengembangan Swasembada dan Ketahanan Nasional :

No	Aspek Fokus	Uraian Detail	Arah Kebijakan / Strategi	Output yang Diharapkan
1	Swasembada Pangan	Penguatan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan nasional berbasis produksi dalam negeri	Pengembangan kawasan pangan terpadu, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, penguatan irigasi, serta modernisasi alat dan mesin pertanian	Terpenuhinya kebutuhan pangan nasional secara mandiri dan stabilnya harga pangan
2	Swasembada Pangan	Penguatan sektor perikanan, peternakan, dan perkebunan sebagai sumber pangan strategis	Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya ikan, peningkatan produksi daging, susu, telur, serta	Peningkatan produksi protein hewani dan nabati nasional

			perkebunan komoditas unggulan	
3	Ketersediaan Input Produksi	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, pestisida, dan sarana produksi pertanian	Subsidi dan distribusi tepat sasaran, digitalisasi distribusi pupuk, dan penguatan rantai pasok pertanian	Efisiensi produksi pertanian dan peningkatan produktivitas petani
4	Ketahanan Energi	Kemandirian energi melalui pengurangan ketergantungan impor dan pengembangan energi baru terbarukan	Pengembangan biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTA, serta optimalisasi lifting minyak dan gas	Ketersediaan energi yang cukup, stabil, dan berkelanjutan
5	Transisi Energi Bersih	Pengembangan energi ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan energi jangka panjang	Implementasi EBT, elektrifikasi desa, konversi kendaraan listrik, dan pengelolaan energi berbasis rendah emisi	Penurunan emisi karbon dan peningkatan bauran energi bersih
6	Ketahanan Air	Penyediaan air bersih untuk kebutuhan domestik, industri, dan pertanian	Pembangunan waduk, embung, jaringan air baku, konservasi daerah aliran sungai, dan swasembada air	Ketersediaan air bersih yang merata dan berkelanjutan
7	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Optimalisasi sumber daya alam untuk mendukung kemandirian nasional	Pengelolaan migas, tambang, kehutanan, dan kelautan secara berkelanjutan	Peningkatan kontribusi SDA terhadap ekonomi nasional
8	Ketahanan Pangan Berbasis Wilayah	Penguatan produksi pangan berbasis desa, daerah, dan kawasan	Lumbung pangan daerah, desa mandiri pangan, serta integrasi hulu-hilir pangan	Kemandirian pangan berbasis wilayah yang merata
9	Stabilitas Rantai Pasok	Menjaga distribusi pangan, energi, dan air agar tidak terganggu	Penguatan logistik nasional, digitalisasi distribusi, dan konektivitas antarwilayah	Stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan dasar
10	Kemandirian Teknologi Pendukung	Penggunaan teknologi dalam sektor pangan, energi, dan air	Smart farming, digital energy system, dan monitoring sumber daya air berbasis teknologi	Efisiensi produksi dan peningkatan produktivitas nasional

c. Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan SDM

Fokus ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial dan peningkatan akses layanan dasar. Berikut penjabaran dari Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan SDM :

No	Aspek Fokus	Uraian Detail	Arah Kebijakan / Strategi	Output yang Diharapkan
1	Peningkatan Gizi Masyarakat	Upaya perbaikan status gizi terutama pada anak, ibu hamil, dan balita untuk menurunkan stunting	Program Makan Bergizi Gratis (MBG), intervensi gizi spesifik dan sensitif	Penurunan stunting, peningkatan kualitas gizi anak dan ibu
2	Pendidikan Berkualitas dan Merata	Pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah	Digitalisasi pendidikan, sekolah rakyat, revitalisasi sarana prasarana pendidikan	Peningkatan rata-rata lama sekolah dan kualitas literasi-numerasi
3	Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan	Peningkatan link and match pendidikan dengan kebutuhan industri	Penguatan SMK, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, program vokasi nasional	Tenaga kerja terampil dan siap kerja
4	Peningkatan Akses Kesehatan	Pemerataan layanan kesehatan dasar dan rujukan	Pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan Puskesmas dan rumah sakit	Peningkatan UHH dan penurunan angka kesakitan
5	Pengentasan Kemiskinan	Penurunan jumlah penduduk miskin melalui intervensi sosial dan ekonomi	Bantuan sosial terintegrasi, Kartu Kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi	Penurunan tingkat kemiskinan nasional
6	Perlindungan Sosial Adaptif	Sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko sosial dan ekonomi	Integrasi data sosial, bantuan sosial berbasis digital	Peningkatan ketahanan sosial masyarakat miskin dan rentan
7	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Penguatan ekonomi keluarga dan masyarakat berbasis usaha produktif	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kartu Usaha Afirmatif	Peningkatan pendapatan masyarakat dan UMKM
8	Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial	Peningkatan partisipasi perempuan, anak, dan disabilitas dalam pembangunan	Perlindungan hukum, akses kerja inklusif, program afirmatif	Peningkatan partisipasi kelompok rentan
9	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional	Pelatihan berbasis kompetensi, reskilling dan upskilling	Tenaga kerja produktif dan berdaya saing
10	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan	Peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh	Integrasi program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi	Peningkatan IPM dan kesejahteraan masyarakat

d. Infrastruktur Strategis dan Konektivitas Wilayah

Fokus ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Berikut penjabaran dari Infrastruktur Strategis dan Konektivitas Wilayah :

No	Aspek Fokus	Uraian Detail	Arah Kebijakan / Strategi	Output yang Diharapkan
1	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta sarana air bersih dan sanitasi	Peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama wilayah kepulauan, perdesaan, dan daerah tertinggal	Aksesibilitas wilayah meningkat dan biaya logistik menurun
2	Konektivitas Transportasi Antarwilayah	Integrasi sistem transportasi darat, laut, dan udara untuk memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat	Pengembangan transportasi multimoda dan penguatan sistem logistik nasional	Waktu tempuh lebih cepat dan efisiensi distribusi meningkat
3	Penguatan Infrastruktur Wilayah Kepulauan	Pembangunan pelabuhan kecil, dermaga rakyat, dan transportasi laut perintis	Pemerataan pembangunan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)	Keterhubungan antar pulau meningkat dan isolasi wilayah berkurang
4	Pengembangan Infrastruktur Digital	Perluasan jaringan internet, BTS, fiber optik, dan digitalisasi layanan publik	Percepatan transformasi digital dan pemerataan akses teknologi informasi	Kesenjangan digital berkurang dan pelayanan publik lebih cepat
5	Pembangunan Infrastruktur Energi dan Air	Penyediaan listrik, energi terbarukan, serta sistem penyediaan air minum dan irigasi	Swasembada energi dan air melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan	Akses listrik dan air bersih merata di seluruh wilayah
6	Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Penyediaan rumah layak huni, pengurangan kawasan kumuh, dan peningkatan sanitasi	Program perumahan rakyat dan penataan kawasan permukiman	Hunian layak meningkat dan kualitas hidup masyarakat membaik
7	Penguatan Infrastruktur Logistik Nasional	Pembangunan pusat logistik, pelabuhan utama, dan sistem distribusi nasional	Efisiensi rantai pasok nasional dan penurunan biaya logistik	Kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga meningkat
8	Infrastruktur Tangguh Bencana	Pembangunan tanggul laut (Giant Sea Wall), penguatan drainase, dan mitigasi risiko bencana	Adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	Wilayah lebih aman dari banjir, abrasi, dan bencana alam
9	Pengembangan Kawasan Strategis	Pengembangan kawasan ekonomi, industri, dan pusat pertumbuhan baru	Pemerataan pembangunan dan penguatan pusat-pusat ekonomi baru	Pertumbuhan ekonomi wilayah lebih merata
10	Integrasi Perencanaan Pusat–Daerah	Sinkronisasi PSN, RPJMN, RPJMD, dan RKPD	Penguatan koordinasi lintas pemerintahan dan perencanaan berbasis data	Pembangunan lebih terarah, efisien, dan tidak tumpang tindih

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara

Prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 dan bagian dari tahapan awal RPJPD Tahun 2025–2045 yang diarahkan pada **“Penguatan Fondasi Transformasi”**. Prioritas pembangunan ini disusun untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu **“Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”**, melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi, tata kelola pemerintahan, pembangunan wilayah, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Secara umum, pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 difokuskan pada lima area strategis sebagai berikut:

No	Prioritas Pembangunan	Uraian Detail	Arah Kebijakan/Strategi	Sasaran Yang Diharapkan
1	Akselerasi Pemenuhan Layanan Dasar	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air minum, sanitasi, serta layanan dasar lainnya	- Peningkatan akses dan mutu pendidikan berkualitas - Penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan - Percepatan penurunan stunting dan kemiskinan - Penguatan perlindungan sosial adaptif	Meningkatnya kualitas SDM, IPM, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial
2	Percepatan Konektivitas Wilayah	Penguatan keterhubungan antarwilayah kepulauan melalui pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan logistik	- Pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara - Penguatan jaringan telekomunikasi dan internet - Peningkatan layanan transportasi antarpulau	Menurunnya disparitas wilayah dan meningkatnya aksesibilitas antarwilayah
3	Pengembangan Wilayah Ekonomi Unggulan dan Hilirisasi SDA	Penguatan sektor unggulan daerah berbasis potensi sumber daya alam serta pengembangan industri hilir	- Hilirisasi pertambangan, perikanan, perkebunan dan pertanian - Pengembangan kawasan industri dan sentra produksi - Peningkatan investasi daerah - Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja dan nilai tambah daerah
4	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Reformasi birokrasi tematik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan

			- Peningkatan kualitas pelayanan public - Penguatan inovasi daerah
5	Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Penguatan kohesi sosial, pelestarian budaya, peningkatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana	- Pelestarian budaya lokal dan kearifan local - Penguatan toleransi dan harmoni sosial - Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan - Pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim

Kelima prioritas tersebut menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027, sekaligus menjadi acuan bagi kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

Sasaran makro pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan konektivitas wilayah kepulauan, penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berikut format tabel **Keselarasasan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Provinsi Maluku Utara Tahun 2027** yang umum digunakan dalam dokumen RKPD.

No	Indikator Makro	Target Tahun 2027		Arah Keselarasan
		Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Taliabu	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	18,50 – 20,00	6,50 – 7,50*	Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor perikanan, pertanian, UMKM, dan infrastruktur konektivitas
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,50 – 6,00	8,50 – 9,50*	Percepatan penurunan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan layanan dasar
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,50 – 4,00	3,00 – 4,00*	Penciptaan lapangan kerja melalui investasi, UMKM, sektor maritim, dan pembangunan infrastruktur

4	Gini Ratio	0,260 – 0,280	0,270 – 0,300*	Pengurangan ketimpangan pendapatan melalui pembangunan ekonomi inklusif dan pemerataan akses layanan
5	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,54 – 0,56	0,50 – 0,53*	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial Masyarakat
6	Pendapatan Per Kapita ADHB (Rp Juta)	95 – 105	55 – 65*	Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan nilai tambah ekonomi local

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu



Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045. Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2027 juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026, isu-isu strategis pembangunan daerah, capaian indikator makro pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Maluku Utara.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, Adaptif) yang Maju di Provinsi Maluku Utara”**, pembangunan daerah Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, percepatan pembangunan infrastruktur wilayah

kepulauan, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan hidup.

Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan keselarasan dengan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2027 yang bertema “**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri**”, serta Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi dan daya saing sumber daya manusia untuk penyiapan fondasi transformasi.

Berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diarahkan pada beberapa fokus utama sebagai berikut:

1. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan berwawasan lingkungan. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam, kawasan pesisir yang luas, serta tingkat kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim, Kabupaten Pulau Taliabu perlu memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup sekaligus meningkatkan kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menghadapi risiko bencana.

Pembangunan lingkungan hidup tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pariwisata yang sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih terintegrasi melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup.

Dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah akan meningkatkan pengawasan terhadap kualitas air, udara, dan tanah, serta mendorong pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penguatan pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, penguatan bank sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, perlindungan kawasan pesisir, laut, dan hutan menjadi bagian penting dari strategi pelestarian lingkungan hidup. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar sehingga diperlukan langkah-langkah konservasi melalui rehabilitasi mangrove, perlindungan terumbu karang, pengendalian aktivitas yang merusak ekosistem pesisir, serta rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan kawasan hutan. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.

Sejalan dengan itu, prioritas pembangunan ini juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Kabupaten Pulau Taliabu menghadapi berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, gelombang pasang, abrasi pantai, cuaca ekstrem, dan bencana lainnya yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana dilakukan melalui penyusunan dan pemutakhiran peta risiko bencana,

penguatan sistem informasi kebencanaan, pengembangan sistem peringatan dini, serta integrasi aspek mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana juga menjadi fokus penting melalui pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), pelaksanaan pelatihan dan simulasi kebencanaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, logistik darurat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat daerah maupun desa.

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, pembangunan Tahun 2027 juga diarahkan pada penerapan prinsip pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi peningkatan ruang terbuka hijau, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penguatan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy).

Melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, meningkatnya persentase timbulan sampah yang terolah, terjaganya kelestarian kawasan pesisir dan hutan, serta meningkatnya ketahanan masyarakat dan wilayah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Adapun strategi dan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Fokus Pembangunan	Cara Yang Dilakukan	Hasil Yang Diharapkan
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah serta memperkuat pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkala	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2	Pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), penguatan bank sampah, peningkatan armada pengangkut sampah, serta edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah	Meningkatnya persentase timbulan sampah yang terolah dan berkurangnya pencemaran lingkungan akibat sampah
3	Konservasi kawasan pesisir dan laut	Rehabilitasi mangrove, perlindungan terumbu karang, pengendalian aktivitas yang merusak ekosistem pesisir, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam konservasi sumber daya laut	Terjaganya kelestarian ekosistem pesisir dan meningkatnya daya dukung lingkungan laut
4	Perlindungan kawasan hutan dan daerah tangkapan air	Rehabilitasi lahan kritis, penghijauan, penanaman pohon, dan penguatan	Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan meningkatnya fungsi ekologis kawasan lindung

		pengawasan terhadap aktivitas perusakan hutan	
5	Pengendalian perubahan iklim	Penyusunan dan implementasi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, peningkatan ruang terbuka hijau, dan pengurangan emisi gas rumah kaca	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim dan berkurangnya emisi GRK
6	Penguatan tata kelola lingkungan hidup	Penyusunan dokumen lingkungan, penguatan pengawasan perizinan lingkungan, dan peningkatan kapasitas aparatur pengelola lingkungan hidup	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan
7	Pengurangan risiko bencana	Penyusunan peta risiko bencana, pemutakhiran data kebencanaan, dan integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah	Menurunnya tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana
8	Peningkatan kapasitas masyarakat tangguh bencana	Pelatihan, simulasi kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), dan penguatan kelompok siaga bencana Masyarakat	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana
9	Penguatan sistem peringatan dini bencana	Pengembangan sistem informasi kebencanaan, pemasangan sarana peringatan dini, dan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait	Meningkatnya kecepatan respon dan efektivitas penanganan bencana
10	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Penyediaan logistik kebencanaan, peralatan tanggap darurat, serta peningkatan kapasitas personel penanggulangan bencana	Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan respon cepat terhadap kejadian bencana
11	Penguatan ketahanan wilayah pesisir terhadap bencana	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pelindung pantai, penguatan vegetasi pantai, serta edukasi mitigasi bencana pesisir	Berkurangnya risiko abrasi, banjir rob, dan dampak bencana pesisir lainnya
12	Pengembangan pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan	Mendorong penggunaan energi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan penerapan prinsip pembangunan hijau	Terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

2. Pembangunan Infrastruktur yang Mendorong Produktivitas Ekonomi Wilayah

Pembangunan infrastruktur yang mendorong produktivitas ekonomi wilayah merupakan salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027. Prioritas ini diarahkan untuk

memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung sektor-sektor unggulan daerah. Sebagai kabupaten kepulauan yang memiliki karakteristik geografis berupa wilayah yang tersebar dan aksesibilitas yang masih terbatas, pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam membuka keterisolasian wilayah, menurunkan biaya logistik, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mempercepat distribusi barang dan jasa.

Pembangunan infrastruktur pada Tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai akan menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat keterhubungan antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan produksi dan permukiman masyarakat.

Salah satu fokus utama dalam prioritas ini adalah peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten, jembatan, pelabuhan, dermaga, serta sarana transportasi laut yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan. Konektivitas yang baik akan memperlancar arus barang dan orang, mempercepat akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan keterhubungan antara pusat pemerintahan, pusat perdagangan, sentra pertanian, kawasan perikanan, dan destinasi pariwisata.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi besar pada sektor perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, pelabuhan perikanan, fasilitas penyimpanan hasil produksi, pasar rakyat, kawasan sentra ekonomi, dan sarana pendukung pariwisata akan terus ditingkatkan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses pasar, mengurangi kehilangan hasil produksi, serta meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

Di bidang infrastruktur dasar, pemerintah daerah akan terus memperluas akses masyarakat terhadap air minum layak, sanitasi aman, perumahan layak huni, dan energi yang berkelanjutan. Penyediaan layanan dasar yang berkualitas merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pelayanan antarwilayah.

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan digital juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan Tahun 2027. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perluasan jaringan internet dan telekomunikasi hingga ke wilayah terpencil akan terus didorong guna memperkuat konektivitas digital serta mendukung transformasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur akan mengedepankan prinsip pemerataan pembangunan antarwilayah, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan terhadap bencana. Setiap pembangunan infrastruktur diupayakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperhatikan aspek daya dukung lingkungan dan karakteristik wilayah kepulauan. Pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis kewilayahan akan dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Pulau Taliabu.

Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan meningkatnya kualitas infrastruktur

dan konektivitas, diharapkan tercipta iklim investasi yang lebih kondusif sehingga mampu menarik investasi pemerintah maupun swasta. Kondisi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Melalui berbagai program pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan terjadi peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar, meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan daerah, serta semakin kuatnya keterhubungan ekonomi antarwilayah di Kabupaten Pulau Taliabu. Infrastruktur yang memadai juga akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan, perdesaan, dan wilayah terpencil.

Adapun strategi dan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Fokus Pembangunan	Cara Yang Dilakukan	Hasil Yang Diharapkan
1	Peningkatan konektivitas antarwilayah	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan kabupaten serta jembatan penghubung antar kecamatan, desa, dan kawasan strategis	Meningkatnya aksesibilitas dan kelancaran mobilitas masyarakat, barang, dan jasa antarwilayah
2	Penguatan transportasi laut dan kepulauan	Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan, dermaga, tambatan perahu, serta peningkatan sarana transportasi laut perintis	Meningkatnya konektivitas wilayah kepulauan dan kelancaran distribusi logistik
3	Pengembangan infrastruktur pendukung sektor perikanan	Pembangunan pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan, cold storage, dan sarana rantai dingin hasil perikanan	Meningkatnya produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor perikanan
4	Pengembangan infrastruktur pertanian dan Perkebunan	Pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi, embung, dan sarana pascapanen	Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan daerah
5	Pengembangan kawasan ekonomi dan sentra produksi	Penyediaan infrastruktur pada kawasan sentra produksi, kawasan perdagangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di daerah
6	Pengembangan infrastruktur pariwisata	Pembangunan akses menuju destinasi wisata, fasilitas pendukung wisata, dan penataan kawasan wisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah
7	Peningkatan akses air minum layak	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan jaringan perpipaan, dan optimalisasi sumber air baku	Meningkatnya cakupan layanan air minum layak bagi masyarakat

8	Peningkatan akses sanitasi aman	Pembangunan sarana sanitasi, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat
9	Penyediaan perumahan dan permukiman layak	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pengembangan kawasan permukiman, dan penyediaan prasarana dasar permukiman	Meningkatnya kualitas hunian dan lingkungan permukiman masyarakat
10	Penguatan infrastruktur energi	Perluasan jaringan listrik, pemanfaatan energi terbarukan, dan peningkatan akses listrik di wilayah terpencil	Meningkatnya rasio elektrifikasi dan ketersediaan energi bagi masyarakat dan dunia usaha
11	Pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan digital	Perluasan jaringan internet, pembangunan menara telekomunikasi, dan penguatan akses digital di desa-desa	Meningkatnya konektivitas digital dan akses informasi masyarakat
12	Pengembangan kawasan strategis daerah	Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan strategis ekonomi, kawasan pesisir, dan pusat pertumbuhan baru	Meningkatnya daya saing wilayah dan percepatan pertumbuhan ekonomi lokal
13	Infrastruktur pendukung UMKM dan ekonomi rakyat	Pembangunan pasar rakyat, sentra UMKM, fasilitas distribusi produk lokal, dan pusat promosi daerah	Meningkatnya produktivitas dan daya saing UMKM serta ekonomi masyarakat
14	Infrastruktur logistik dan distribusi	Penguatan jaringan distribusi barang, gudang penyimpanan, dan fasilitas logistik daerah	Menurunnya biaya logistik dan meningkatnya efisiensi distribusi barang
15	Infrastruktur yang tangguh terhadap bencana	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim
16	Pemerataan pembangunan wilayah kepulauan	Prioritas pembangunan infrastruktur pada desa tertinggal, wilayah terpencil, dan pulau-pulau terluar	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antarwilayah dan meningkatnya pemerataan pelayanan dasar

3. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 yang diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, berkarakter, dan berdaya saing. SDM yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan daerah sekaligus faktor penentu dalam mewujudkan transformasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan SDM menjadi fokus strategis yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan SDM, antara lain keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, tingginya angka stunting pada beberapa wilayah, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta masih adanya kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan akses pelayanan dasar. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam bidang kesehatan, pembangunan Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perluasan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta penguatan program promotif dan preventif. Selain itu, percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu agenda utama yang dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih, edukasi kesehatan keluarga, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Di bidang pendidikan, pembangunan diarahkan pada peningkatan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan pada semua jenjang. Pemerintah daerah akan mendorong peningkatan partisipasi sekolah, pengurangan angka putus sekolah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, penguatan pendidikan karakter, literasi, numerasi, dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran akan terus ditingkatkan guna mempersiapkan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Penguatan kualitas SDM juga dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi daerah. Program pelatihan kerja, pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kewirausahaan akan diperluas untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Pengembangan kompetensi masyarakat diarahkan untuk mendukung sektor-sektor unggulan Kabupaten Pulau Taliabu, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan UMKM.

Selain pendidikan dan kesehatan, pembangunan SDM juga mencakup penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah daerah akan memperkuat program perlindungan sosial yang adaptif untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terhadap berbagai risiko ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas juga menjadi bagian penting dalam prioritas pembangunan SDM. Perempuan didorong untuk memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kegiatan ekonomi produktif. Pemuda diarahkan menjadi agen perubahan dan penggerak pembangunan melalui pengembangan kapasitas, kewirausahaan, inovasi, dan kepemimpinan. Sementara itu, penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang lebih setara dalam memperoleh layanan publik, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan sesuai dengan prinsip pembangunan yang inklusif.

Dalam menghadapi era transformasi digital dan persaingan global, pembangunan SDM juga diarahkan untuk meningkatkan literasi digital, kemampuan teknologi informasi, dan keterampilan abad ke-21. Penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap informasi dan layanan, serta mendorong lahirnya inovasi yang mendukung pembangunan daerah.

Pelaksanaan prioritas penguatan kualitas SDM dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta

masyarakat secara luas. Sinergi berbagai pihak diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan SDM tidak hanya berorientasi pada peningkatan indikator pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mampu menghasilkan masyarakat yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Adapun strategi dan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Fokus Pembangunan	Cara Yang Dilakukan	Hasil Yang Diharapkan
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan tenaga kesehatan, serta penguatan layanan kesehatan primer	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan angka harapan hidup
2	Percepatan penurunan stunting	Intervensi gizi spesifik dan sensitif, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi keluarga, peningkatan sanitasi dan air bersih	Menurunnya prevalensi stunting dan meningkatnya status gizi masyarakat
3	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Penguatan pelayanan antenatal care, persalinan oleh tenaga kesehatan, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi serta meningkatnya kesehatan ibu dan anak
4	Penguatan jaminan kesehatan masyarakat	Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan	Meningkatnya cakupan perlindungan kesehatan masyarakat
5	Peningkatan akses pendidikan yang merata	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan pendidikan, serta perluasan akses pendidikan di wilayah terpencil	Meningkatnya angka partisipasi sekolah dan pemerataan layanan pendidikan
6	Peningkatan mutu pendidikan	Peningkatan kompetensi guru, penguatan kurikulum, pembelajaran berbasis teknologi, serta pengembangan literasi dan numerasi	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan
7	Pengurangan angka putus sekolah	Program bantuan pendidikan, beasiswa, dan pendampingan peserta didik berisiko putus sekolah	Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya rata-rata lama sekolah
8	Pengembangan pendidikan vokasi dan keterampilan	Pelatihan kerja, pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dengan dunia usaha dan industry	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
9	Pengembangan kewirausahaan masyarakat	Pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan penguatan inkubasi bisnis	Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan usaha produktif masyarakat

10	Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal	Pelatihan berbasis potensi daerah seperti perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Meningkatnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja daerah
11	Penguatan perlindungan sosial	Peningkatan cakupan bantuan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan sistem perlindungan sosial adaptif	Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat
12	Pemberdayaan perempuan	Penguatan kapasitas perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi
13	Pengembangan kepemudaan	Pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan pemuda, pengembangan kreativitas dan inovasi generasi muda	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
14	Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas	Penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kesempatan kerja	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas
15	Penguatan literasi digital masyarakat	Pelatihan teknologi informasi, peningkatan akses internet, dan edukasi pemanfaatan teknologi digital	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital
16	Penguatan karakter dan budaya masyarakat	Pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai budaya lokal, toleransi sosial, dan wawasan kebangsaan	Terbentuknya masyarakat yang berkarakter, toleran, dan berbudaya
17	Pengembangan prestasi olahraga dan kreativitas masyarakat	Pembinaan atlet daerah, penyediaan sarana olahraga, dan pengembangan kegiatan seni budaya	Meningkatnya prestasi olahraga dan kreativitas masyarakat
18	Penguatan ketahanan keluarga	Edukasi keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, dan pemberdayaan keluarga	Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan masyarakat

4. Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan

Penguatan pertumbuhan, pemerataan ekonomi, dan penanganan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 yang diarahkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tumbuh secara berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Prioritas ini menjadi sangat penting mengingat pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai daerah kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Potensi tersebut meliputi sektor perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, pariwisata, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Tahun 2027 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk lokal.

Penguatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui penyediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penerapan teknologi tepat guna, serta penguatan akses terhadap pasar dan pembiayaan. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi produktif dan sentra-sentra produksi akan terus ditingkatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Sektor perikanan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu akan terus diperkuat melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan sarana dan prasarana perikanan, peningkatan kualitas hasil perikanan, serta penguatan rantai nilai komoditas perikanan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tukar nelayan, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pada sektor pertanian dan perkebunan, pembangunan diarahkan pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah melalui penguatan infrastruktur pertanian, penyediaan benih unggul, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan sistem pemasaran yang lebih efisien. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan mendukung pengembangan ekonomi pedesaan.

Selain penguatan sektor primer, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan sebagai salah satu strategi penting dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penguatan UMKM dilakukan melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, digitalisasi pemasaran, serta pengembangan kemitraan usaha. Sejalan dengan kebijakan nasional, pengembangan **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih** juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Pengembangan sektor pariwisata juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi wisata alam, bahari, dan budaya yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas destinasi wisata, pengembangan fasilitas pendukung pariwisata, promosi destinasi unggulan, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan Tahun 2027 diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, pengembangan ekonomi desa, pembangunan kawasan tertinggal, serta pemberdayaan kelompok rentan dan masyarakat miskin. Pemerataan pembangunan menjadi penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Penanganan kemiskinan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Program-program pengentasan kemiskinan akan diarahkan pada peningkatan

kapasitas ekonomi rumah tangga miskin, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, pengembangan usaha produktif, peningkatan keterampilan kerja, serta perluasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Selain itu, pembangunan ekonomi daerah juga diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kepastian hukum, dan promosi investasi daerah. Masuknya investasi baru diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas daerah, dan memperluas basis ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu

Adapun strategi dan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Fokus Pembangunan	Cara Yang Dilakukan	Hasil Yang Diharapkan
1	Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pengembangan sektor unggulan (pertanian, perikanan, perkebunan), peningkatan investasi daerah, dan penyederhanaan perizinan usaha	Ekonomi daerah tumbuh stabil, PDRB meningkat, sektor produktif berkembang
2	Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal	Pelatihan kewirausahaan, akses permodalan (KUR), digitalisasi UMKM, penguatan koperasi desa	UMKM naik kelas, pendapatan rumah tangga meningkat, ekonomi lokal lebih mandiri
3	Pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi	Pembangunan jalan produksi, jembatan, pelabuhan, pasar rakyat, dan transportasi antarwilayah	Kesenjangan wilayah menurun, akses pasar lebih mudah, biaya distribusi turun
4	Penurunan kemiskinan berbasis data terpadu	Pemutakhiran DTKS, integrasi data kemiskinan lintas sektor, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran	Bantuan sosial lebih akurat, exclusion error menurun, kemiskinan ekstrem berkurang
5	Perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem	Program bantuan tunai bersyarat, bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan intervensi kemiskinan ekstrem berbasis keluarga	Kebutuhan dasar terpenuhi, kemiskinan ekstrem menurun signifikan
6	Pemberdayaan masyarakat miskin	Program padat karya, pelatihan kerja, pemberdayaan perempuan kepala keluarga, dan desa mandiri	Rumah tangga miskin memiliki sumber pendapatan berkelanjutan
7	Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	Peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah tertinggal	Kualitas hidup meningkat, kesenjangan layanan dasar berkurang
8	Penguatan graduasi kemiskinan	Pendampingan keluarga miskin, monitoring berkelanjutan, dan	Keluarga miskin keluar dari ketergantungan bantuan sosial (graduasi)

5. Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah

Peningkatan transformasi pelayanan publik dan inovasi daerah merupakan salah satu prioritas strategis pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem administrasi, tetapi juga pada perubahan mendasar dalam cara pemerintah memberikan layanan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah diarahkan untuk memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai fondasi utama digitalisasi layanan publik. Penguatan SPBE mencakup integrasi data antar-perangkat daerah, pengembangan layanan daring (online services), serta peningkatan infrastruktur digital hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan administrasi secara lebih cepat, mudah, dan tanpa hambatan geografis yang selama ini menjadi tantangan utama di wilayah kepulauan.

Selain digitalisasi, transformasi pelayanan publik juga menekankan pentingnya inovasi daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi ini dapat berupa penyederhanaan prosedur layanan, pengembangan layanan terpadu satu pintu, hingga pemanfaatan aplikasi berbasis mobile untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, dan layanan sosial. Pemerintah daerah didorong untuk membangun budaya inovasi di seluruh perangkat daerah melalui kompetisi inovasi, inkubasi ide, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas lokal.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur juga menjadi bagian penting dalam transformasi ini. Aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki kompetensi digital, kemampuan manajerial yang adaptif, serta orientasi pelayanan publik yang berfokus pada kepuasan masyarakat. Pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa transformasi tidak hanya bersifat teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi.

Di sisi lain, penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek yang tidak terpisahkan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat yang cepat dan responsif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus meminimalkan praktik birokrasi yang tidak efisien.

Adapun strategi dan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Fokus Pembangunan	Cara Yang Dilakukan	Hasil Yang Diharapkan
1	Digitalisasi pelayanan publik	Pengembangan dan optimalisasi SPBE, layanan administrasi berbasis online, serta integrasi data antar perangkat daerah	Pelayanan publik lebih cepat, mudah diakses, dan efisien
2	Peningkatan kualitas layanan administrasi	Penyederhanaan prosedur layanan, penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan standardisasi pelayanan	Waktu pelayanan lebih singkat, birokrasi lebih sederhana, kepuasan masyarakat meningkat

3	Penguatan inovasi daerah	Kompetisi inovasi daerah, inkubasi ide layanan publik, dan pengembangan inovasi berbasis kebutuhan Masyarakat	Munculnya berbagai inovasi layanan publik yang efektif dan tepat guna
4	Penguatan kapasitas ASN	Pelatihan literasi digital, manajemen pelayanan publik, dan pengembangan kompetensi berbasis kinerja	ASN lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan
5	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan	Pengembangan sistem pengawasan berbasis digital, keterbukaan informasi publik, dan penguatan e-government	Pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat
6	Penguatan layanan pengaduan masyarakat	Pengembangan kanal pengaduan terpadu (online/offline), respon cepat terhadap laporan Masyarakat	Aspirasi dan keluhan masyarakat tertangani lebih cepat dan tepat
7	Kolaborasi inovasi lintas sektor	Kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas dalam pengembangan inovasi daerah	Terwujud ekosistem inovasi yang kolaboratif dan berkelanjutan
8	Pemerataan akses layanan hingga wilayah terpencil	Penguatan infrastruktur TIK di wilayah kepulauan dan penggunaan layanan mobile service	Kesenjangan akses layanan publik antarwilayah menurun

Target utama pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disusun sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah pada tahun ketiga RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029. Penetapan target ini memperhatikan hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2026, kondisi makro ekonomi dan sosial daerah, arah kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2027, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara.

Secara umum, target pembangunan Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, pembangunan juga difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas wilayah kepulauan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana.

Pada aspek pembangunan manusia, target utama diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan angka harapan hidup, penurunan stunting, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Di sektor pendidikan, peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi indikator utama dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

Pada aspek ekonomi, target pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, perkebunan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran

terbuka menjadi prioritas utama yang ditempuh melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi daerah, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Selanjutnya, pada aspek pemerataan dan kesejahteraan, pembangunan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui perbaikan Gini Ratio serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Upaya ini didukung oleh peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti perumahan layak huni, air minum layak, dan sanitasi yang aman.

Pada aspek infrastruktur, target pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui perbaikan kualitas jalan, penguatan transportasi laut, serta peningkatan akses telekomunikasi di wilayah kepulauan. Hal ini diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah di Kabupaten Pulau Taliabu.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, target diarahkan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, pada aspek lingkungan hidup, pembangunan Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pengelolaan sampah yang lebih baik, serta penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan risiko bencana, mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang rentan terhadap dampak lingkungan.

Berikut tabel Target Utama Pencapaian Sasaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2026	Target 2027
1.1	Membangun sumber daya manusia Kabupaten Pulau Taliabu yang sehat	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,5*	68,0–68,3
1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	185*	145–140
1.2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,52*	0,54–0,56
1.2.1	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,0*	12,2 – 12,4
2.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	B
2.1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,25*	1,35 – 1,50
2.1.2	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,05*	3,10 – 3,25

3.1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	2,45*	2,55 – 2,65
3.1.1	Meningkatnya kemudahan konektivitas antar wilayah	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	%	65,00*	70,00 – 75,00
		Cakupan layanan telekomunikasi	%	78*	85–88
3.1.2	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga Layak Huni	%	72,0*	78,0–82,0
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum	%	74,0	80,0–82,0
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	70,0*	76,0 – 80,0
4.1	Membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi	Tingkat Kemiskinan	%	9,80*	8,50 – 9,00
4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	3,20*	3,40 – 3,60
		Pengembangan Pariwisata – Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	%	2,10*	2,25 – 2,40
		Pengembangan Pariwisata – Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,85*	2,05 – 2,25
4.1.2	Meningkatkan SDM yang kompeten dan produktif secara inklusif	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	1,20*	1,50 – 1,80
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,0*	57,5 – 59,0
4.2	Memperkuat peran UMKM dan badan usaha lainnya	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kabupaten/Kota	%	92,50	94,00

4.2.1	Meningkatnya kewirausahaan, daya saing dan kemandirian UMKM, Koperasi, BUMD, dan badan usaha lainnya	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD – Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,15	2,35
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,85	0,95
5.1	Terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20	6,50
5.1.1	Meningkatkan ekonomi masyarakat secara inklusif	Rasio Gini	Indeks	0,310	0,300
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	32,00	38,00
5.1.2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	10,50	9,80
5.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	68,50	70,00
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	18,00	25,00
5.2.1	Perwujudan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	%	139,00	134,00
6.1	Menguatnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	68,00	69,50
6.1.1	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Angka Kriminalitas (tingkat kejahatan)	per 100.000 penduduk	85	80
7.1	Meningkatnya produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan pelaku usaha sektor perikanan	Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	105,50	108,00

Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 pada aspek sumber daya manusia yang sehat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah

dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029.

Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui indikator **Angka Harapan Hidup (AHH)** yang mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2026, Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **67,5 tahun**, dan ditargetkan meningkat pada tahun 2027 menjadi sekitar **68,0–68,3 tahun**.

Peningkatan ini akan dicapai melalui berbagai intervensi pembangunan kesehatan yang mencakup penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan akses dan kualitas fasilitas kesehatan, percepatan penurunan angka stunting, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan juga menjadi fokus utama.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu pada Tahun 2027 menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan secara merata di seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan dan terpencil.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator **Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup**, yang mencerminkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan ibu dan sistem rujukan kesehatan di daerah. Pada tahun 2026, angka kematian ibu tercatat sebesar **185 per 100.000 kelahiran hidup**. Melalui penguatan intervensi layanan kesehatan, pada Tahun 2027 ditargetkan terjadi penurunan signifikan menjadi **140–145 per 100.000 kelahiran hidup**.

Penurunan angka kematian ibu tersebut akan dicapai melalui berbagai strategi, antara lain peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, penguatan layanan antenatal care (ANC) dan postnatal care (PNC), peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal, serta peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai di wilayah terpencil dan kepulauan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan peran masyarakat melalui edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin, serta penguatan peran kader kesehatan dan posyandu. Dengan demikian, diharapkan terjadi sinergi antara pelayanan kesehatan formal dan partisipasi masyarakat dalam menurunkan risiko kematian ibu.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing pada Tahun 2027 merupakan salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka memperkuat fondasi transformasi pembangunan daerah. Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan, serta daya saing masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dinamika ekonomi, dan tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif.

Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui indikator **Indeks Modal Manusia (IMM)** yang menggambarkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas penduduk. Pada tahun 2026, nilai Indeks Modal Manusia Kabupaten Pulau Taliabu berada pada angka **0,52**, yang menunjukkan masih perlunya penguatan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Sejalan dengan upaya percepatan pembangunan manusia, pada Tahun 2027 Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat pada kisaran **0,54–0,56**. Peningkatan ini diharapkan dapat dicapai melalui berbagai intervensi kebijakan, antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan dasar yang lebih baik, penurunan stunting, serta penguatan program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi lokal, khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah seperti perikanan, pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata pada Tahun 2027 merupakan salah satu prioritas utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pulau Taliabu. Upaya ini diarahkan untuk memastikan seluruh penduduk usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala oleh faktor geografis, ekonomi, maupun sosial.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator **Harapan Lama Sekolah (HLS)** yang mencerminkan lamanya pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk pada usia tertentu. Pada kondisi tahun 2026, Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar **12,0 tahun**, yang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk diharapkan menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas.

Sejalan dengan upaya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, pada Tahun 2027 ditargetkan terjadi peningkatan Harapan Lama Sekolah menjadi **12,2 hingga 12,4 tahun**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam akses dan partisipasi pendidikan masyarakat, baik melalui perluasan layanan pendidikan formal, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan distribusi tenaga pendidik, maupun penguatan program afirmasi pendidikan di wilayah terpencil dan kepulauan.

Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi pendidikan, penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah, serta peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, dukungan terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui berbagai program bantuan pendidikan menjadi bagian penting dalam memperkecil kesenjangan akses pendidikan.

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi daerah yang berkelanjutan. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan prinsip good governance serta tuntutan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Pada kondisi tahun 2026, kualitas tata kelola pemerintahan masih menunjukkan capaian pada kategori **C (cukup)** yang menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi, efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta kualitas pelayanan publik masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.

Seiring dengan itu, pada Tahun 2027 pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi kategori **B (baik)**. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi, serta penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah.

Pencapaian target ini juga didukung oleh peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, transformasi tata kelola pemerintahan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, perubahan dari kondisi **C (2026)** menjadi **B (2027)** menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam mewujudkan birokrasi yang semakin adaptif, inovatif, dan

berorientasi hasil sebagai fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi daerah yang diarahkan untuk memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang positif. Pada tahun 2026, capaian kinerja tata kelola pemerintahan berada pada angka **1,25**, yang mencerminkan kondisi awal pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan daerah. Selanjutnya, pada tahun 2027 ditargetkan terjadi peningkatan menjadi **1,35–1,50 persen**, sebagai bentuk akselerasi perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Peningkatan target tersebut akan dicapai melalui berbagai strategi, antara lain penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi fokus utama dalam mendukung pencapaian sasaran ini.

Peningkatan kualitas pelayanan publik pada Tahun 2027 menjadi salah satu prioritas penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu. Upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh layanan pemerintah daerah dapat diakses secara mudah, cepat, transparan, dan akuntabel oleh masyarakat, baik pada layanan administrasi pemerintahan, layanan dasar, maupun layanan publik lainnya.

Kualitas pelayanan publik diukur melalui **Indeks Pelayanan Publik**, yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan oleh perangkat daerah. Pada Tahun 2026, capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pulau Taliabu berada pada angka **3,05**, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berada pada kategori cukup baik namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai standar pelayanan yang lebih optimal.

Sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik berbasis digital, maka pada Tahun 2027 ditetapkan target peningkatan Indeks Pelayanan Publik menjadi sebesar **3,10 hingga 3,25**. Peningkatan ini diharapkan dapat dicapai melalui berbagai strategi, antara lain penguatan standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan mekanisme pengaduan dan umpan balik masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga didukung oleh penguatan inovasi pelayanan di tingkat perangkat daerah, peningkatan integritas aparatur, serta perluasan akses layanan hingga ke wilayah-wilayah terpencil dan kepulauan. Dengan demikian, pelayanan publik diharapkan tidak hanya meningkat dari sisi kualitas, tetapi juga dari sisi pemerataan dan keterjangkauan layanan.

Pembangunan infrastruktur Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diarahkan untuk mewujudkan infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah di daerah kepulauan. Penguatan infrastruktur menjadi prioritas strategis mengingat karakteristik geografis

Kabupaten Pulau Taliabu yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan tingkat aksesibilitas yang masih perlu terus ditingkatkan.

Kinerja pembangunan infrastruktur daerah diukur melalui indikator indeks pembangunan infrastruktur yang pada tahun 2026 berada pada angka **2,45**. Melalui berbagai intervensi pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan terarah, pada tahun 2027 ditargetkan terjadi peningkatan indeks menjadi **2,55 hingga 2,65**. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas dan cakupan layanan infrastruktur dasar maupun konektivitas wilayah.

Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten, penguatan transportasi antarwilayah darat dan laut, peningkatan aksesibilitas wilayah terpencil dan perbatasan, serta pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi seperti pelabuhan, dermaga, dan sarana distribusi barang dan jasa. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak huni, serta jaringan telekomunikasi juga terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kemudahan konektivitas antar wilayah merupakan salah satu prioritas utama pembangunan infrastruktur Kabupaten Pulau Taliabu pada Tahun 2027, mengingat karakteristik wilayah yang berbasis kepulauan serta masih adanya tantangan keterhubungan antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pada tahun 2026, tingkat kemudahan konektivitas antar wilayah Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **65,00**, yang menggambarkan masih terbatasnya kualitas dan keterjangkauan akses transportasi darat, laut, serta dukungan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan antarwilayah kecamatan dan desa. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam upaya percepatan pembangunan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Tahun 2027, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kemudahan konektivitas antar wilayah menjadi sebesar **70,00–75,00**. Peningkatan ini akan dicapai melalui penguatan infrastruktur transportasi darat seperti peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten, pembangunan jembatan penghubung antar kawasan, serta peningkatan kualitas layanan transportasi laut yang menjadi moda utama mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

Selain itu, dukungan infrastruktur penunjang seperti peningkatan jaringan telekomunikasi dan digitalisasi layanan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas non-fisik antarwilayah. Integrasi antar moda transportasi serta penguatan simpul-simpul ekonomi lokal diharapkan mampu memperlancar arus barang, jasa, dan manusia secara lebih efektif dan efisien.

Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat pemenuhan layanan dasar. Sasaran ini tidak hanya berfokus pada penyediaan rumah yang layak huni, tetapi juga mencakup peningkatan akses terhadap air minum layak serta sanitasi aman yang menjadi komponen utama dalam mendukung kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2027, pemerintah daerah menargetkan peningkatan persentase rumah tangga layak huni dari kondisi tahun 2026 sebesar **72,0 persen** menjadi **78,0–82,0 persen**. Peningkatan ini dilakukan melalui berbagai intervensi, antara lain pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor terkait dalam penyediaan hunian yang lebih layak dan berkelanjutan.

Selanjutnya, akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak juga ditargetkan meningkat dari **74,0 persen pada tahun 2026** menjadi **80,0–82,0 persen pada tahun 2027**. Peningkatan ini didorong melalui pengembangan dan optimalisasi sistem penyediaan air minum, peningkatan kapasitas

infrastruktur air bersih, serta perluasan jaringan layanan air minum yang menjangkau wilayah permukiman secara lebih merata.

Selain itu, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman juga menjadi perhatian utama pembangunan daerah, dengan target peningkatan dari **70,0 persen pada tahun 2026** menjadi **76,0–80,0 persen pada tahun 2027**. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas sanitasi layak, peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

Secara keseluruhan, peningkatan ketiga indikator tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam memperkuat pelayanan dasar masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya target tersebut, diharapkan kualitas permukiman masyarakat semakin meningkat, derajat kesehatan lingkungan menjadi lebih baik, serta tercipta kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan bermartabat.

Upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diarahkan secara konsisten pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan melalui pendekatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis potensi lokal. Sasaran ini merupakan bagian penting dari implementasi RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 yang menempatkan pengurangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui penguatan intervensi pada sektor-sektor strategis, terutama peningkatan kesempatan kerja, pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta penguatan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat program perlindungan sosial yang adaptif untuk memastikan kelompok masyarakat rentan tetap terlindungi dalam proses pembangunan.

Pada Tahun 2027, tingkat kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu ditargetkan mengalami penurunan dari **9,80 persen pada tahun 2026 menjadi pada kisaran 8,50–9,00 persen**. Target ini menunjukkan adanya akselerasi upaya pengentasan kemiskinan melalui sinergi program lintas sektor, baik melalui intervensi langsung pemerintah maupun dukungan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta sektor swasta dan masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah produk unggulan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor industri pengolahan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Arah kebijakan ini menjadi bagian penting dalam upaya transformasi ekonomi daerah dari berbasis sumber daya primer menuju ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada sektor industri pengolahan, peningkatan nilai tambah ekonomi diwujudkan melalui penguatan hilirisasi produk unggulan daerah, khususnya hasil perikanan, pertanian, dan perkebunan. Pengembangan industri pengolahan diharapkan mampu meningkatkan Rasio PDRB Industri Pengolahan dari kondisi tahun 2026 sebesar **3,20** menjadi **3,40–3,60 pada tahun 2027**. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya peran industri pengolahan dalam struktur perekonomian daerah serta meningkatnya kapasitas produksi dan daya saing produk lokal.

Selanjutnya, pada sektor pariwisata, pengembangan diarahkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata daerah melalui peningkatan kualitas layanan, pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal, serta penguatan investasi di sektor jasa akomodasi dan kuliner. Upaya tersebut ditargetkan mampu meningkatkan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum dari **2,10 pada tahun 2026 menjadi 2,25–2,40 pada tahun 2027**, yang menunjukkan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, pada sektor ekonomi kreatif, pembangunan difokuskan pada penguatan pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar produk kreatif daerah. Pengembangan ini ditargetkan mampu meningkatkan Rasio PDRB Ekonomi Kreatif dari **1,85 pada tahun 2026 menjadi 2,05–2,25 pada tahun 2027**, yang mencerminkan meningkatnya peran ekonomi kreatif sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah yang inovatif dan berdaya saing.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan produktif secara inklusif pada Tahun 2027 diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja yang adil dan setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam mewujudkan pembangunan SDM yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga inklusif, berkeadilan, dan berperspektif kesetaraan.

Dalam rangka meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan, pemerintah daerah mendorong perluasan akses kerja formal bagi penyandang disabilitas melalui penguatan kebijakan afirmatif, peningkatan akses pelatihan vokasional, kemitraan dengan dunia usaha, serta penciptaan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Kondisi awal tahun 2026 menunjukkan bahwa **persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal sebesar 1,20 persen**, dan ditargetkan meningkat pada tahun 2027 menjadi **1,50–1,80 persen**. Peningkatan ini mencerminkan semakin terbukanya kesempatan kerja yang inklusif serta meningkatnya kesadaran dunia kerja terhadap pentingnya kesetaraan akses kerja bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, peningkatan peran perempuan dalam angkatan kerja juga menjadi fokus penting dalam pembangunan SDM Kabupaten Pulau Taliabu. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan, penguatan kewirausahaan perempuan, dukungan terhadap pekerja perempuan, serta penghapusan berbagai hambatan struktural yang membatasi partisipasi perempuan di pasar kerja. Pada tahun 2026, **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tercatat sebesar 56,0 persen**, dan ditargetkan meningkat menjadi **57,5–59,0 persen pada tahun 2027**.

Upaya memperkuat peran UMKM dan badan usaha lainnya pada Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan struktur ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis potensi lokal. UMKM dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperluas basis ekonomi masyarakat.

Penguatan sektor UMKM dan IKM dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan, penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, serta perluasan akses pasar baik lokal maupun antarwilayah. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong digitalisasi UMKM, pengembangan produk unggulan daerah, serta peningkatan kualitas dan standardisasi produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator **Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada level Kabupaten/Kota**, yang mencerminkan tingkat perkembangan dan dominasi sektor IKM dalam struktur ekonomi daerah. Pada Tahun 2027, indikator ini ditargetkan meningkat dari **92,50 pada tahun 2026 menjadi 94,00 pada tahun 2027**. Peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah serta meningkatnya jumlah usaha produktif yang berkembang dan berkelanjutan.

Peningkatan kewirausahaan, daya saing, dan kemandirian UMKM, Koperasi, BUMD, serta badan usaha lainnya pada Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta kelembagaan koperasi dan BUMD menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Upaya pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan strategis, antara lain peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan usaha, fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan, digitalisasi usaha, serta perluasan akses pasar baik lokal maupun regional. Selain itu, penguatan kelembagaan koperasi dan BUMD diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha, profesionalisme pengelolaan, serta kemampuan bersaing dalam ekosistem ekonomi daerah.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator **Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD yang tercermin dalam Rasio Kewirausahaan Daerah**, yang ditargetkan meningkat dari **2,15 pada tahun 2026 menjadi 2,35 pada tahun 2027**. Peningkatan ini menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas kewirausahaan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.

Selain itu, penguatan sektor koperasi juga menjadi perhatian utama melalui indikator **Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**, yang ditargetkan meningkat dari **0,85 pada tahun 2026 menjadi 0,95 pada tahun 2027**. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya kontribusi koperasi dalam struktur perekonomian daerah serta meningkatnya peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Sasaran pembangunan **“Terwujudnya ekonomi rakyat yang berdaya saing”** pada Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan nilai tambah produk lokal agar mampu bersaing di pasar regional maupun nasional.

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan sasaran tersebut. Pada tahun 2026, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu tercatat sebesar **5,20 persen**, dan ditargetkan meningkat menjadi **6,50 persen pada tahun 2027**. Peningkatan ini mencerminkan adanya akselerasi aktivitas ekonomi masyarakat yang didorong oleh peningkatan investasi daerah, penguatan produktivitas sektor riil, serta perluasan kesempatan kerja.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pengembangan hilirisasi hasil perikanan dan pertanian, penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan usaha, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi. Selain itu, peningkatan konektivitas wilayah kepulauan juga menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa serta menurunkan biaya logistik.

Peningkatan ekonomi masyarakat secara inklusif pada Tahun 2027 diarahkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya berfokus pada peningkatan angka makro, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini menekankan pada pengurangan ketimpangan pendapatan, perluasan akses terhadap kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan sosial bagi tenaga kerja, khususnya kelompok rentan dan pekerja sektor informal.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah **Rasio Gini**, yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pada Tahun 2027, Rasio Gini ditargetkan mengalami perbaikan dari **0,310 pada tahun 2026 menjadi 0,300 pada tahun 2027**. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan pemerataan hasil pembangunan melalui penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

Selain itu, peningkatan ekonomi inklusif juga diukur melalui **cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten**, yang mencerminkan tingkat perlindungan tenaga kerja terhadap risiko sosial ekonomi. Pada Tahun 2027, cakupan kepesertaan ditargetkan meningkat dari **32,00 persen pada tahun 2026 menjadi 38,00 persen pada tahun 2027**. Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja formal maupun informal, yang didorong melalui perluasan kepesertaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.

Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan pada Tahun 2027 merupakan salah satu prioritas strategis Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor-sektor tersebut memiliki peran penting sebagai penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat sekaligus sebagai sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduk di wilayah kabupaten.

Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain peningkatan akses petani dan peternak terhadap sarana produksi pertanian, penguatan penyuluhan dan pendampingan teknis, pemanfaatan teknologi pertanian yang adaptif, pengembangan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta penguatan kelembagaan kelompok tani dan usaha agribisnis. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong diversifikasi pangan lokal serta penguatan rantai pasok pangan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di seluruh wilayah.

Keberhasilan sasaran ini tidak hanya diukur dari peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, tetapi juga dari aspek ketahanan pangan masyarakat. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)** yang menggambarkan proporsi penduduk dengan asupan energi di bawah kebutuhan minimum.

Pada Tahun 2027, indikator tersebut ditargetkan menurun dari **10,50 pada tahun 2026 menjadi 9,80**, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya ketahanan pangan daerah serta membaiknya kesejahteraan rumah tangga, khususnya di wilayah pedesaan dan pesisir.

Peningkatan kualitas pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 merupakan salah satu prioritas penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Arah kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta optimalisasi tata ruang yang berkelanjutan.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)** yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Pada tahun 2027, IKLHD ditargetkan meningkat dari **68,50 pada tahun 2026 menjadi 70,00**, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan secara bertahap melalui penguatan kebijakan pengendalian pencemaran, rehabilitasi lingkungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, pengelolaan persampahan menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Hal ini diukur melalui indikator **Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**, yang menggambarkan tingkat efektivitas sistem pengelolaan sampah di daerah. Pada tahun 2027, indikator tersebut ditargetkan meningkat dari **18,00 persen pada tahun 2026 menjadi 25,00 persen**, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengolahan sampah melalui penguatan fasilitas pengolahan, optimalisasi sistem pengumpulan dan pemilahan sampah, serta pengembangan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di tingkat masyarakat.

Perwujudan ketangguhan masyarakat terhadap bencana pada Tahun 2027 merupakan salah satu prioritas penting dalam rangka memperkuat aspek ketahanan daerah Kabupaten Pulau Taliabu, mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana secara cepat dan efektif.

Strategi pembangunan ketangguhan bencana dilaksanakan melalui penguatan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia kebencanaan, penyusunan dan pemutakhiran peta risiko bencana, serta penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*). Selain itu, peningkatan literasi kebencanaan masyarakat, penguatan desa tangguh bencana, serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah juga menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian sasaran ini.

Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui indikator **Indeks Risiko Bencana (IRB)** yang menggambarkan tingkat kerentanan dan risiko suatu wilayah terhadap potensi bencana. Pada Tahun 2027, Kabupaten Pulau Taliabu menargetkan penurunan nilai IRB dari **139,00 pada tahun 2026 menjadi 134,00 pada tahun 2027**. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana, serta semakin efektifnya upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.

Penguatan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah yang kondusif sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan.

Upaya penguatan kerukunan dan toleransi dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat, penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, fasilitasi dialog lintas kelompok masyarakat, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam mencegah potensi konflik sosial sejak dini. Selain itu, penguatan kelembagaan demokrasi lokal juga terus didorong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)** sebagai indikator yang mencerminkan kualitas kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Pada Tahun 2027, Kabupaten Pulau Taliabu menargetkan peningkatan nilai IDI dari **68,00 pada tahun 2026 menjadi 69,50 pada tahun 2027**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas kehidupan demokrasi daerah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, serta semakin kuatnya budaya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan di tengah masyarakat.

Sasaran pembangunan **“Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman”** pada Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah di Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisi keamanan yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan investasi, serta menjamin kualitas hidup masyarakat.

Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat, peningkatan peran aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam pencegahan tindak kriminalitas, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Selain itu, pendekatan preventif melalui edukasi sosial, pembinaan generasi muda, serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya juga menjadi bagian penting dalam strategi penurunan angka kriminalitas.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator **Angka Kriminalitas (tingkat kejahatan per 100.000 penduduk)**, yang pada kondisi tahun 2026 tercatat sebesar **85 kasus per 100.000 penduduk**. Melalui berbagai upaya yang dilakukan secara terintegrasi, target Tahun 2027 ditetapkan menurun menjadi **80 kasus per 100.000 penduduk**. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya efektivitas sistem pencegahan dan penanganan kriminalitas serta semakin kuatnya rasa aman di tengah masyarakat.

Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan pelaku usaha sektor perikanan pada Tahun 2027 merupakan salah satu fokus utama pembangunan ekonomi Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka memperkuat sektor unggulan daerah berbasis kemaritiman. Sasaran ini diarahkan untuk

meningkatkan daya saing nelayan serta memperbaiki struktur ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya, penguatan rantai nilai hasil perikanan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan.

Upaya pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai intervensi kebijakan, antara lain peningkatan ketersediaan dan akses terhadap sarana produksi perikanan, penguatan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan dan cold storage, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan, serta penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan kelompok usaha bersama. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** yang mencerminkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Pada Tahun 2026, Nilai Tukar Nelayan tercatat sebesar **105,50**, dan ditargetkan meningkat menjadi **108,00 pada Tahun 2027**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan nelayan, di mana pendapatan yang diterima dari usaha perikanan diharapkan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan biaya produksi.

4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan antara Dokumen RKP, RKPD Provinsi Maluku Utara dengan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu

Keselarasn tema dan prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah digambarkan sebagai berikut :



Selain memperhatikan keselarasan tema dan prioritas pembangunan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 juga mengacu pada target kinerja sasaran makro yang telah ditetapkan pada tingkat nasional dan provinsi. Keselarasan target kinerja makro tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah mampu

memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus menjawab kebutuhan dan karakteristik pembangunan daerah.

Sasaran makro pembangunan merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara agregat, meliputi aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, target-target yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, serta target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Maluku Utara.

Dalam kerangka tersebut, Kabupaten Pulau Taliabu berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pembangunan daerah juga diarahkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat, serta menjaga kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana.

Keselaran target kinerja makro antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten merupakan wujud sinkronisasi perencanaan pembangunan yang bertujuan menciptakan keterpaduan kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Dengan adanya keselaran tersebut, diharapkan setiap intervensi pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Maluku Utara dan target pembangunan nasional secara keseluruhan.

Adapun keselaran target kinerja sasaran makro antara Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2027, dan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

No	Indikator Kinerja	PKP 2027 (Nasional)	RKPD Provinsi Maluku Utara 2027	RKPD Kabupaten Pulau Taliabu 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9 – 7,5	5,8 – 6,8	6,5 – 7,2
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	75 – 85	55 – 65	60 – 68
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	5,5 – 6,5	8,5 – 9,0
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	3,5 – 4,0	3,2 – 3,8
5	Gini Ratio (nilai)	0,37 – 0,38	0,32 – 0,34	0,29 – 0,31
6	Indeks Modal Manusia	0,56 – 0,58	0,54 – 0,56	0,52 – 0,55
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	27 – 30	20 – 25	15 – 20
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75 – 78	72 – 75	70 – 73

Keseluruhan prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 telah disusun secara selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027. Keselaran tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi pembangunan antarwilayah, meningkatkan efektivitas

pelaksanaan program pembangunan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional secara berkelanjutan. Adapun bentuk keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

No	RKP 2027 (Nasional)	Provinsi Maluku Utara (RKPD 2027)	Kabupaten Pulau Taliabu (RKPD 2027)	Keselarasan Tema
1	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Prioritas Daerah 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Inovatif	Prioritas Daerah 5: Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, berintegritas, transparan, dan inovatif dalam pelayanan public
2	Prioritas Nasional 2: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru	Prioritas Daerah 2: Ekonomi Maritim dan Sumber Daya Alam yang Maju dan Bernilai Tambah Tinggi	Prioritas Daerah 4: Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan	Penguatan kemandirian ekonomi berbasis SDA lokal (pangan, perikanan, energi, UMKM, dan ekonomi biru)
3	Prioritas Nasional 3: Infrastruktur, lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, agromaritim berbasis koperasi	Prioritas Daerah 3: Konektivitas dan Infrastruktur Wilayah Kepulauan yang Merata dan Andal	Prioritas Daerah 2: Pembangunan Infrastruktur yang Mendorong Produktivitas Ekonomi Wilayah	Penguatan konektivitas wilayah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah
4	Prioritas Nasional 4: Penguatan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda, dan disabilitas	Prioritas Daerah 1: SDM yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3: Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, teknologi, dan inklusi sosial
5	Prioritas Nasional 5: Hilirisasi dan industri berbasis SDA untuk nilai tambah	Prioritas Daerah 2: Ekonomi Maritim dan Sumber Daya Alam yang Maju dan Bernilai Tambah Tinggi	Prioritas Daerah 4: Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan	Pengembangan industri berbasis SDA lokal dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah
6	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan	Prioritas Daerah 2: Ekonomi Maritim dan Sumber Daya Alam yang Maju dan Bernilai Tambah Tinggi	Prioritas Daerah 4: Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan	Pembangunan berbasis desa, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi wilayah

7	Prioritas Nasional 7: Reformasi birokrasi, hukum, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Prioritas Daerah 4: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Inovatif	Prioritas Daerah 5: Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan penguatan integritas pemerintahan
8	Prioritas Nasional 8: Kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi	Prioritas Daerah 5: Lingkungan Hidup yang Lestari dan Ketahanan Sosial Budaya yang Kuat	Prioritas Daerah 1: Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, ketahanan bencana, dan penguatan sosial budaya

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 juga menyelaraskan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah dengan **17 (tujuh belas) Program Prioritas Nasional** dan **8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)** yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Penyelarasan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional melalui optimalisasi potensi daerah, penguatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, Kabupaten Pulau Taliabu mengarahkan pembangunan daerah pada penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, pengembangan sektor ekonomi produktif, penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif. Arah pembangunan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai Program Prioritas Nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.

Selain itu, pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) juga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Berbagai program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan penurunan kemiskinan, penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah sesuai kewenangan dan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan agenda pembangunan nasional.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, diharapkan berbagai Program Prioritas Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat dapat diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Pulau Taliabu sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Adapun penjabaran keterkaitan antara Program Prioritas Nasional, Program Hasil Terbaik Cepat, dan sasaran pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

No	RKP 2027 (Nasional)	Kabupaten Pulau Taliabu (RKPD 2027)	Keselarasan Tema
----	---------------------	-------------------------------------	------------------

1	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 5: Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. b. Meningkatnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). c. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. e. Berkembangnya inovasi daerah untuk mendukung efektivitas pelayanan publik.
2	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Daerah 4: Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan	a. Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan. b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan energi. c. Berkembangnya UMKM dan ekonomi berbasis potensi lokal. d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi. e. Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat.
3	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2: Pembangunan Infrastruktur yang Mendorong Produktivitas Ekonomi Wilayah	a. Meningkatnya konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan. b. Meningkatnya aksesibilitas kawasan produksi dan sentra ekonomi. c. Meningkatnya infrastruktur transportasi dan logistik daerah. d. Bertambahnya lapangan kerja dan peluang usaha masyarakat. e. Berkembangnya koperasi dan usaha produktif berbasis potensi daerah.
4	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Prioritas Daerah 3: Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan. b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. c. Menurunnya angka stunting dan masalah gizi. d. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan keterampilan masyarakat. e. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. f. Meningkatnya prestasi olahraga dan pengembangan bakat generasi muda.

5	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 4: Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan	a. Meningkatnya nilai tambah produk pertanian, perkebunan, dan perikanan. b. Berkembangnya industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. c. Meningkatnya investasi pada sektor unggulan daerah. d. Meningkatnya daya saing produk lokal. e. Bertambahnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
6	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 4: Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan	a. Menurunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. b. Meningkatnya pembangunan dan kemandirian desa. c. Meningkatnya pendapatan masyarakat desa. d. Berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat. e. Meningkatnya pemerataan pembangunan antarwilayah.
7	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Prioritas Daerah 5: Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	a. Meningkatnya efektivitas reformasi birokrasi. b. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. c. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital. e. Menguatnya budaya integritas dan anti korupsi dalam birokrasi.
8	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 1: Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. b. Menurunnya risiko dan dampak bencana alam. c. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. d. Terjaganya kelestarian ekosistem pesisir, laut, dan hutan. e. Menguatnya nilai budaya lokal, toleransi, dan kohesi sosial masyarakat.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 serta Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027. Keselarasan tersebut merupakan wujud implementasi prinsip sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan guna memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyelarasan prioritas pembangunan dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pulau Taliabu mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan dan kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan wilayah dan nasional secara menyeluruh.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang meliputi **Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, Pembangunan Infrastruktur yang Mendorong Produktivitas Ekonomi Wilayah, Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan**, serta **Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah**, memiliki keterkaitan yang kuat dengan lima Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027.

Keselarasannya tercermin pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terwujudnya SDM yang unggul, sehat, dan berdaya saing; penguatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi sumber daya alam dan kemaritiman untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah; pembangunan infrastruktur yang memperkuat konektivitas wilayah kepulauan; penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan inovatif melalui transformasi pelayanan publik; serta pelestarian lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan sosial budaya.

Melalui keselarasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berupaya membangun sinergi pembangunan yang lebih efektif antar tingkatan pemerintahan sehingga setiap program dan kegiatan pembangunan dapat saling mendukung, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, keselarasan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, meningkatkan daya saing wilayah, memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Adapun keselarasan antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 yang telah memperhatikan arah kebijakan RKP Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut :

No	Provinsi Maluku Utara (RKPD 2027)	Kabupaten Pulau Taliabu (RKPD 2027)	Keselarasannya Tema
1	Prioritas Daerah 1: SDM yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3: Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan. b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas. c. Menurunnya prevalensi stunting dan masalah gizi masyarakat. d. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. e. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. f. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang sehat dan produktif.